

**STRATEGI KOMUNIKASI YAYASAN KEBAYA DALAM UPAYA
MENGURANGI DISKRIMINASI KEBEBASAN BERAGAMA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Kom)

Oleh

BERNETTA NINDYA ASTUTI

16 09 05906

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**STRATEGI KOMUNIKASI YAYASAN KEBAYA DALAM UPAYA
MENGURANGI DISKRIMINASI KEBEBASAN BERAGAMA**

SKRIPSI

Disusun Guna Melengkapi Tugas Akhir Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar

Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

disusun oleh :

BERNETTA NINDYA ASTUTI

160905906

disetujui oleh :


Lukas Deni Setiawan, MA

PROGRAM STUDI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Yayasan Kebaya Dalam Upaya Mengurangi Diskriminasi Kebebasan Beragama

Penyusun : Bernetta Nindya Astuti

NPM : 160905906

Telah diuji dan dipertahankan pada Sidang Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada

Hari / Tanggal : Selasa, 24 November 2020

Pukul : 11.00 WIB

Tempat : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

TIM PENGUJI

Josep Joedhi Darmawan, M.A

Penguji Utama



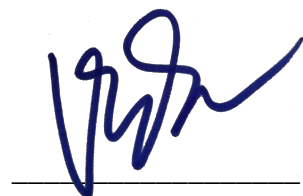
Lukas Deni Setiawan, M.A

Penguji I



Irene Santika Vidiadari, M.A

Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bernetta Nindya Astuti

NPM : 160905906

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Yayasan Kebaya Dalam Upaya Mengurangi Diskriminasi Kebebasan Beragama

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya dan kerja saya sendiri. Skripsi ini bukan merupakan plagiasi, duplikasi maupun pencurian hasil karya orang lain.

Bila di kemudian hari diduga ada ketidaksesuaian antara fakta dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk diproses oleh tim fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi. Bila terbukti bahwa terdapat plagiasi maupun bentuk ketidakjujuran lain, saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan keserjanaan saya.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran sendiri dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 3 November 2020

Saya yang menyatakan,

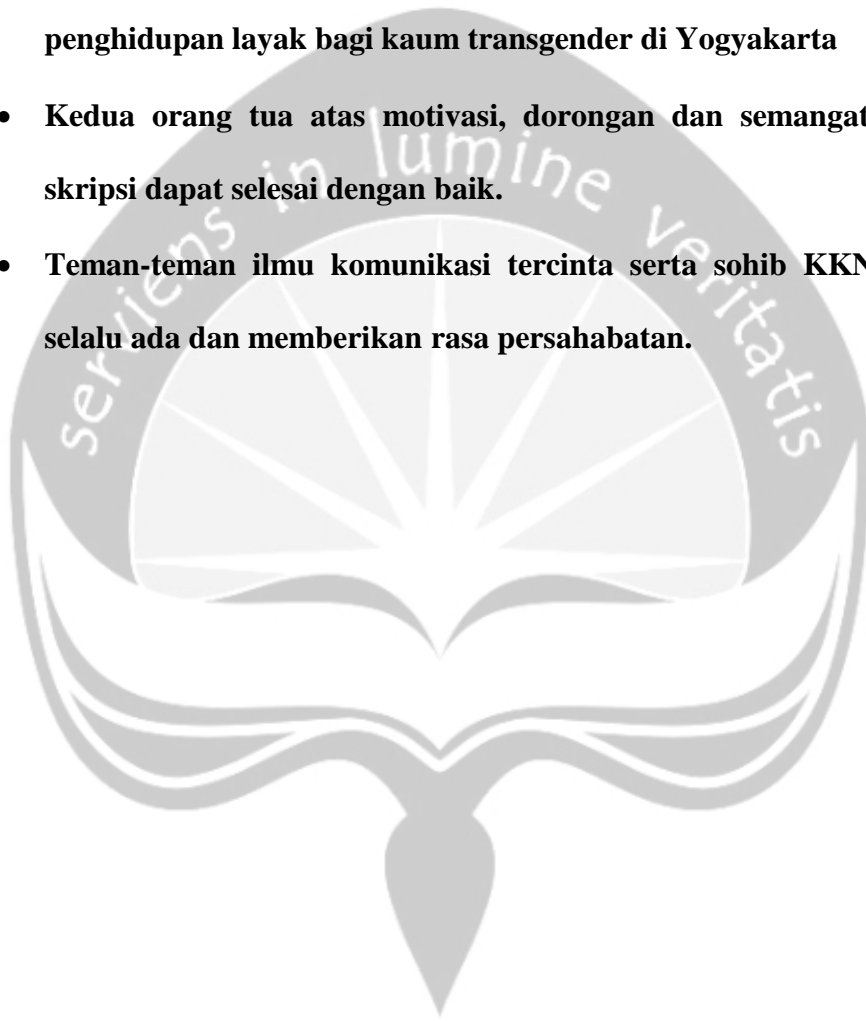


Bernetta Nindya Astuti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Yayasan Kebaya yang sedang berjuang memberikan keadilan dan penghidupan layak bagi kaum transgender di Yogyakarta
- Kedua orang tua atas motivasi, dorongan dan semangat sehingga skripsi dapat selesai dengan baik.
- Teman-teman ilmu komunikasi tercinta serta sohib KKN 71 yang selalu ada dan memberikan rasa persahabatan.



KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada Tuhan YME atas berkah melimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang merupakan syarat kelulusan ini. Setelah selama kurang lebih 4 tahun menimba ilmu di jurusan ilmu komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sampailah sudah di tahap ini.

Tak lupa, segala ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua orang yang membantu penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi. Sebab, tanpa dorongan, doa serta kata-kata motivasi, penulis mungkin masih berada di tahap awal dan sulit berdiri lagi. Maka dari itu, teruntuk mereka yang menjadi penolong berarti, saya ucapkan sekali lagi, terima kasih untuk:

1. Yayasan Kebaya yang membantu terlaksananya skripsi ini
2. Bapak Lukas Deni Setiawan, MA selaku dosen pembimbing skripsi.
3. Semua dosen penguji, baik di tahap seminar proposal sampai penguji tahap akhir.
4. Heru dan Selyi, kedua orang tua tercinta, Edwin, adik satu-satunya serta Piko Mochi.
5. Semua teman seperjuangan yang masih berusaha meraih mimpi-mimpinya.

Akhir kata, semoga skripsi ini berguna bagi pembaca sekaligus menjadi media penulis agar terus bermawas diri dan belajar. Atas kekurangannya, penulis berharap agar mendapatkan kritik dan saran. Terima kasih

Yogyakarta, 3 November 2020



Bernetta Nindya Astuti

ABSTRAK

Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, diskriminasi terhadap kaum orientasi seksual dan ekspresi gender minoritas dalam ranah agama menempati peringkat tertinggi pada 2019 (Genia, 2019). Angka tersebut tentu belum berhenti melihat Yayasan Kebaya masih mengadvokasi kawan-kawan waria Yogyakarta yang mendapatkan pendiskriminasian berbasis agama hingga tahun ini. Berangkat dari fakta tersebut, strategi komunikasi Yayasan Kebaya untuk mengurangi pendiskriminasian kebebasan beragama menjadi topik penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana Yayasan Kebaya berkomunikasi dengan masyarakat agar muncul pemahaman tentang hak beragama universal. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan strategi komunikasi Yayasan Kebaya di aspek kesiapan komunikator Yayasan Kebaya, kesiapan pesan yang Yayasan Kebaya atur agar dapat masyarakat pahami, apa contoh kegiatan yang Yayasan Kebaya lakukan saat turun ke masyarakat hingga tujuan akhir apa yang Yayasan Kebaya harapkan setelah melakukan segala strategi komunikasi tersebut.

Kata kunci: Strategi Komunikasi, LGBT, Kebebasan Beragama

Daftar Isi

| | |
|------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR GRAFIK | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teori | 9 |
| 1. Strategi Komunikasi | 9 |
| 2. Organisasi | 15 |

| | |
|---|----|
| 3. Kebebasan Beragama | 17 |
| F. Metodologi | 19 |
| 1. Jenis Penelitian | 19 |
| 2. Metode Penelitian | 20 |
| 3. Subjek Penelitian | 20 |
| 4. Jenis Data | 21 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 21 |
| 6. Metode Analisis Data | 22 |
| BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | 24 |
| BAB III PEMBAHASAN | 31 |
| A. Temuan Data | 31 |
| B. Analisis | 48 |
| BAB IV PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN | 85 |

Daftar Grafik

Grafik 1: Metode analisis Miles & Habermas.....23

Grafik 2: Jumlah konten stigma terhadap kaum LGBT.....69



Daftar Gambar

Gambar 1: Kolom komentar ‘Gangguan Jin Kaum Sodom’ Trans TV.....3

Gambar 2: Yayasan Kebaya turun ke masyarakat



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebebasan beragama adalah satu dari beberapa nilai yang terlindungi hak asasi manusia serta tertanam dalam diri sebagai bagian dari hal kodrati. John Rawls mempertegas hal ini dalam penjabarannya tentang hak asasi manusia yang mengungkapkan bahwa salah satu prinsip yang harus muncul adalah prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), salah satunya adalah kebebasan beragama (Santoso Meilanny, 2016). Namun, meskipun mengangkat kata '*equal*' yang berarti kesetaraan, penerapan nilai kebebasan beragama belum sepenuhnya terlaksana bagi kaum minoritas. Hal ini disayangkan karena ketika membicarakan hak asasi manusia, maka seyogyanya ia berlaku universal tanpa pandang bulu.

Tidak penuhnya pelaksanaan kebebasan beragama ini, salah satunya, dirasakan oleh sebuah yayasan asal Yogyakarta yang bergerak di bidang pengadvokasian kaum transgender. Yayasan yang bernama Kebaya dan beranggotakan para transgender ini melalui Jeni Mikha selaku focal point Yayasan Kebaya menuturkan bahwa “belum ada yang menjamin, yaitu pemerintah yang belum bisa mengakomodir kebebasan beragama untuk orang-orang minoritas secara seksualitas,” (wawancara, Jeni Mikha, focal point, 20 September 2020). Memang, hak-hak lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) sering kali digambarkan secara fundamental bertentangan dengan kebebasan beragama, sebagai contoh khas tentang bagaimana perbedaan hak asasi manusia dapat

berbenturan (Endsjo, 2020). Anggapan bahwa agama tidak satu jalur dengan LGBT ini lah yang kemudian dapat berujung pada persepsi negatif terkait LGBT dan pada tingkat lebih berbahaya, diskriminasi kebebasan beragama bagi kaum ini.

Lalu bagaimana persepsi negatif ini dapat terjadi? Salah satu penelitian oleh Anastasiia Kuptsevych yang membahas bagaimana agama membentuk persepsi seseorang tentang tindakan homoseksual menunjukkan bahwa orang yang lebih jarang menghadiri rumah ibadah untuk tujuan keagamaan akan cenderung memiliki sikap positif terhadap kaum LGBT daripada orang yang lebih sering pergi ke beribadah, Jika orang tersebut cenderung untuk menganalisis isi kitab suci sebagai benar, orang tersebut cenderung memiliki sikap yang lebih negatif terhadap kaum ini (Kuptsevych, 2014). Pada kadar pembenaran isi kitab suci kemudian Dede dalam Arfanda dan Sakaria (2015) menjelaskan bahwa sebagian dari masyarakat yang berpandangan negatif terhadap kaum LGBT khususnya transgender terperangkap dalam penafsiran ajaran agama yang harfiah dan tidak kontekstual. (Arfanda & Sakaria, 2015).

Penafsiran ajaran agama yang negatif oleh masyarakat terhadap kaum minoritas orientasi seksual dan ekspresi gender ini kemudian bisa mendapatkan afirmasi dari berbagai sumber, salah satunya media. Misal bagaimana media menjadi corong bagi pejabat publik atau konten dengan narasi dominan untuk memperkuat argumen penolakan kaum orientasi seksual dan ekspresi gender minoritas dalam konteks agama. Salah satunya acara TV Khazanah Islam yang tayang di Trans TV dengan segmennya 'Gangguan Jin Kaum Sodom'. Di acara berdurasi 20 menit yang diunggah ulang ke *youtube* itu, terlihat bagaimana LGBT disangkut pautkan dengan sebuah kelainan yang dapat sembuh dengan ruqyah. Di

beberapa menit awal, sudah terlihat adegan seorang pria yang ‘ceritanya’ kerasukan jin perempuan. Di adegan yang sama, seorang ustad seakan bercakap-cakap dengan si jin di mana ia mengatakan, bahwa menyukai sesama jenis adalah sebuah bentuk dosa, “Ada azab di dunia mengapa? karena ada yang penyuka sesama jenis,” ucap ustad dalam acara TV tersebut. Saat menerawangnya, korelasinya adalah seputar informasi tak tepat mengenai seksualitas manusia yang seharusnya cukup kompleks namun disederhanakan menjadi ‘jika ia LGBT, maka ia sudah kerasukan jin’

Bermula dari pemikiran bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yang mengonsumsi informasi media tersebut, dapat terlihat pula bagaimana reaksi audiens yang menyaksikan tayangan ‘Gangguan Jin Kaum Sodom’ yang kemudian ‘ikut-ikutan’ menyangkutpautkan 4 kaum minoritas ini sebagai penyakit yang dapat sembuh dengan iman semata.

GAMBAR 1

Kolom komentar pada tayangan ulang ‘Gangguan Jin Kaum Sodom’ Trans TV



(Sumber gambar: youtube)

Belum lagi melihat data dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat dalam penelitian kuantitatifnya dengan tajuk “Kelompok Minoritas Dalam Terpaan Pelanggaran HAM” yang menemukan bahwa dari 188 konten media yang menjadi

obyek penelitian, pandangan bahwa orientasi seksual LGBT tidak sesuai ajaran agama menempati peringkat paling atas dengan jumlah paling banyak, yaitu 30 konten media (Teresia Genia, 2019). Penelitian ini merupakan pemantauan dan pencatatan media, terdapat 170 berita dari 69 laman media daring yang terdiri dari tiga jenis media yakni:

1. Media berita nasional, seperti: Tribun, Republika, Detik dan lainnya
2. Media berita lokal, seperti: Riau Mandiri, Media Bogor, Go Riau dan
3. lainnya
4. Media berita internasional berbahasa Indonesia: BBC dan CNN Indonesia

Melansir penelitian oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, selain diskriminasi dalam ranah agama (30), masih ada beberapa stigma yang terjadi di media (Teresia Genia, 2019). Stigma tersebut adalah LGBT menyimpang (28), Merusak generasi muda (22), Tidak sesuai hukum dan budaya Indonesia (18), Berbahaya (17), Sumber HIV dan IMS (15), Penyakit (14), Penyebab bencana alam (8), Azab (8), Gangguan jiwa (8), Liberalisme (5), Ancaman Keamanan Negara (4), Maksiat (4), Menular (3), Terorisme (2), Gerakan politik global (1) dan Menjijikan (1).

Media yang menayangkan hal-hal semacam ini agaknya tidak menyadari bahwa ia mempunyai kuasa untuk merasuki pikiran audiensnya. Maksudnya, tak dapat terpungkir bahwa media dapat membentuk realitas kita; bahkan mendorong kita untuk berpandangan seperti itu. Lebihnya, jika konteksnya adalah isu dengan narasi dominan, maka media dapat menciptakan benteng pelindung bagi narasi

tersebut. George Gerbner sudah pernah membahas pemikiran mengenai dunia yang terbentuk oleh media ini, salah satunya televisi, dalam analisis kultivasi yang berbicara bahwa, “Pola berulang dari pesan dan gambar televisi membentuk mainstream yang memperkuat konsepsi realitas yang paling banyak dipegang,” (Gerbner et al, 1978 dalam Turner & West, 2014). Tak dipungkiri, tidak semua orang yang menyaksikan acara televisi atau konten di media akan jatuh pada persepsi negatif terkait LGBT. Tetapi, juga tidak dapat dikatakan tidak, jika media tidak dapat membingkai realitas sebagian lainnya.

Apalagi mereka yang berbicara di media tersebut adalah bisa jadi berasal dari lembaga keagamaan besar seperti Anwar Abbas dari Muhammadiyah, salah satu dari dua yang terbesar Ormas Islam di Indonesia menjelaskan bahwa LGBT adalah penyakit yang harus disembuhkan, dan selanjutnya merupakan penyimpangan norma agama. Menurut Abbas, LGBT tidak ada hubungannya dengan masalah hak asasi manusia, dan karena itu, negara harus membantu menyembuhkan mereka, tidak mentolerir atau bahkan melegalkan keinginan mereka (Muthmainnah, 2015). Majelis Ulama Indonesia baru-baru ini pun juga membahas isu LGBT sambil berargumen bahwa LGBT “adalah penyakit dan harus diobati bukan justru didukung”. Di sinilah kemudian diskriminasi kebebasan beragama dapat terjadi; ketika benturan antara LGBT dan anggapannya yang tidak dengan agama digunakan sebagai alasan melakukan tindakan tersebut.

Pada konteks permasalahan diskriminasi kebebasan beragama yang Yayasan Kebaya advokasi, misalnya, Yayasan Kebaya pernah mengadvokasi sebuah pesantren waria di Yogyakarta pada tahun 2016. Pesantren yang juga merupakan tempat personil Yayasan Kebaya beribadah ini mendapatkan penolakan

dari warga sekitar dan Front Jihad Islam karena dianggap meresahkan dan mengajarkan nilai LGBT (LBH Yogyakarta, 2016). Rully Mally selaku pengelola program Yayasan Kebaya menjelaskan bahwa tentu hal ini menciptakan rasa ketakutan bagi kaum transgender di Yogyakarta kala itu. Berjalan maju, sekitar beberapa bulan lalu, Yayasan Kebaya baru saja mengadvokasi sebuah tindakan pengkriminalisasian kawan transgender mereka di Kulon Progo karena mereka mengenakan hijab. Sebabnya, pelapor beranggapan bahwa kaum LGBT yang mengenakan hijab adalah tindakan penistaan agama.

Di sini lah urgensi pengurangan diskriminasi kebebasan beragama muncul. Apalagi mereka yang diadvokasi adalah bagian dari komunitas transgender yang Yayasan Kebaya juga merupakan bagiannya (*peers*). Yayasan Kebaya menganggap bahwa kebebasan beragama harus ditegakkan secara universal dan di saat yang sama diskriminasi terhadapnya harus dihilangkan. Sebab tutur Rully Malay selaku pengelola program Yayasan Kebaya, seharusnya, “Pada dasarnya kita ini sama dimata Tuhan, sama di mata hukum, sama di mata negara dan bangsa ini. Kita tidak perlu melihat terlalu jauh soal perbedaan karena tidak akan ada titik temunya,” (Wawancara Rully Mally, pengelola program, 20 Agustus 2020).

Rully menambahkan bahwa turun menjamah masyarakat untuk menyadarkan mereka tentang kebebasan beragama yang universal bagi semua tanpa terkecuali adalah kunci hilangnya diskriminasi kebebasan beragama ini. Harus ada komunikasi verbal yang maksimal. Yayasan Kebaya harus menyiapkan pesan yang matang saat terjun ke masyarakat karena jelasnya, tak mungkin sebuah pesan tersampaikan jika tak ada bahasa verbal yang dapat masyarakat sasaran pahami. Kegiatan turun ke masyarakat ini pun dilakukan sambil memberdayakan

masyarakat sasaran sehingga pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sasaran tersebut di mana dialog tentang kebebasan beragama bagi kaum marginal ini diangkat.

Melihat perjuangan Yayasan Kebaya untuk menyetarakan semua orientasi seksual dalam satu spektrum kebebasan beragama dan menyadarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Yayasan Kebaya melakukan strategi komunikasinya dalam tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebebasan beragama adalah juga hak kaum minoritas. Peneliti ingin melihat bagaimana Yayasan Kebaya memaparkan pesannya agar nantinya pesan ini dapat dipahami masyarakat sasaran.

Di sini, peneliti memilih Yayasan Kebaya Yogyakarta sebagai tempat penelitian ini karena Yayasan Kebaya sudah berdinamika sejak 2006 dan merupakan lembaga senior yang bergerak di bidang advokasi serta menaungi kaum LGBT, khususnya transgender. Peneliti menganggap bahwa Yayasan Kebaya merupakan sebuah organisasi yang sudah dewasa dalam menghadapi pasang surutnya pandangan dari masyarakat serta memiliki cukup pengalaman dalam mengorganisasikan visi misinya.

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat fenomena diskriminasi kebebasan beragama yang Yayasan Kebaya alami serta keinginan Yayasan Kebaya untuk menghilangkan diskriminasi kebebasan beragama bagi kaum minoritas orientasi seksual dan ekspresi gender, peneliti ingin mendalami:

- Bagaimana strategi komunikasi Yayasan Kebaya dalam upaya mengurangi diskriminasi kebebasan beragama?

C. TUJUAN

- Menjelaskan bagaimana Yayasan Kebaya melakukan strategi komunikasinya dalam upaya mengurangi diskriminasi kebebasan beragama kaum minoritas.

D. MANFAAT

- Akademis
Memberikan sumbangsih pada ilmu komunikasi terkait strategi komunikasi Yayasan Kebaya dalam upayanya menegakkan kebebasan beragama tanpa diskriminasi bagi kaum transgender.
- Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Yayasan Kebaya serta bagi badan advokasi lainnya agar dapat melakukan strategi komunikasi maksimal terkait kebebasan beragama tanpa diskriminasi bagi kaum minoritas.

E. KERANGKA TEORI

1. STRATEGI KOMUNIKASI

a. Pengertian Strategi Komunikasi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik *stratos* yang artinya tentara dan *gein* yang artinya memimpin, kemudian muncul istilah *strategos* yang artinya pemimpin tentara (Cangara, 2017: 64). Strategi adalah rancangan terbaik untuk memenangkan perang. Jika ditarik dalam masalah terkait komunikasi hari ini, Middleton mendeskripsikan strategi sebagai kombinasi terbaik semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima sampai pengaruh (efek) yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan komunikasi maksimal (Middleton, 1980 dalam Cangara 2017:64).

Di titik lebih kompleks, Rogers (1982 dalam Cangara 2017:64) menjelaskan bahwa strategi komunikasi adalah suatu cara untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala besar melalui transfer ide-ide baru. Dalam perjalanannya, strategi komunikasi pun menjadi sebuah roda yang mampu menghilangkan kebisingan informasi sehingga lawan bicara dapat cepat memahami maksud komunikator; bahwa strategi komunikasi mendorong efektifitas penyampaian pesan (Suryadi, 2018:3).

b. Sifat Strategi Komunikasi

Onong Effendy menjabarkan bahwa strategi komunikasi memiliki fungsi untuk menyebarluaskan pesan komunikasi informatif, persuasif atau instruktif secara sistematis, serta menjembatani kesenjangan budaya. (Effendy, 1981:67 dalam Suryadi 2018:5). Mengaca pada definisi tersebut, maka strategi komunikasi

adalah sebuah tindakan untuk merumuskan suatu cara agar komunikasi berjalan lancar dan pesan dapat dipahami oleh komunikan. Secara garis besar, Edi Suryadi dalam buku bertajuk Strategi Komunikasi: Sebuah Analisis Teori dan Praktis di Era Global menjelaskan bahwa sifat strategi komunikasi meliputi (Suryadi, 2018: 10):

- Bagian terintegrasi dari perencanaan komunikasi
- Membutuhkan peran dan kredibilitas komunikator
- Membutuhkan setting komunikasi yang jelas
- Dapat digunakan dalam berbagai situasi komunikasi
- Dapat dirasakan implementasinya dalam kajian organisasi
- Memberi manfaat yang mengukur tingkat efektivitas pesan kepada komunikan.

c. Perencanaan dalam Strategi Komunikasi

Beberapa hal yang tak lepas dari eksistensi strategi, yaitu perencanaan yang merupakan proses penetapan spesifikasi tujuan termasuk cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu (Keuffman, 1972 dalam Cangara, 2017: 24). Keberadaannya ditujukan untuk penyebarluasan informasi, penyadaran masyarakat atau pemasaran. Lalu menilik keterkaitan strategi dan perencanaan; bahwa dalam setiap strategi diawali dengan perencanaan dan berakhir pada tindakan operasional atau eksekusi. Terkait perencanaan dalam konteks komunikasi, ia didefinisikan oleh Middleton sebagai pengalokasian sumber daya komunikasi, tak hanya melalui media massa atau antar pribadi namun setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan tertentu (Middleton 1987 dalam Cangara 2017: 47). Secara singkat, perencanaan memiliki fungsi untuk Mengidentifikasi dan menetapkan masalah, memberikan arahan untuk

mengatasi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan sumber daya, melakukan perkiraan kendala, memilih alternatif terbaik, mencari solusi untuk permasalahan, menetapkan skala prioritas dan menetapkan mekanisme pemantauan dan alat ukur untuk evaluasi.

Setelah semua rencana dieksekusi, masuklah pada kegiatan penilaian keberhasilan strategi komunikasi yang Cangara sebut sebagai evaluasi (Cangara 2017: 174). Kegiatan evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi program dan evaluasi manajemen. Evaluasi program adalah kegiatan melihat apakah tujuan dari suatu program sudah tercapai sedangkan evaluasi manajemen adalah kegiatan melihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik (Cangara, 2017: 174).

d. Komponen Strategi Komunikasi

Dilansir dari buku Strategi Komunikasi: Sebuah Analisis Teori dan Praktis di Era Global (Suryadi, 2018: 107) terdapat beberapa komponen utama dalam strategi komunikasi yang dapat dijawab dengan pola Laswell, yaitu:

- Sumber : Komunikator yang hendak menyampaikan makna melalui komunikasi verbal atau non-verbal. Jalaludin Rahmat (Prismarini, 2017) menjelaskan bahwa komunikator yang baik memiliki 3 faktor penentu, yaitu kredibilitas, atraksi dan kekuasaan.
1. Kredibilitas : merupakan bentuk citra yang berdasarkan keahlian dan kepercayaan. Keahlian adalah ketika komunikator memiliki wawasan , berpengetahuan dan memiliki kewenangan tertentu untuk berbicara tentang topik yang muncul. Sedangkan, kepercayaan adalah ketika

komunikator menunjukkan sikap objektif, bijak, adil serta integritas pribadi yang kemudian membuat khalayak tertarik untuk mendengar.

2. Daya Tarik : Meliputi penampilan serta daya persuasif komunikator. Walaupun demikian, daya tarik ini bersifat subjektif bagi khalayak pendengar karena biasanya berhubungan dengan daya tarik fisik.
 3. Kekuasaan : Dapat berupa kemampuan komunikator untuk mengajak seseorang mendengar karena posisinya yang tinggi serta terpandang sehingga orang tersebut tidak menolak. Kekuasaan pun terbagi menjadi kekuasaan dengan paksaan (*koersive*), kekuasaan dengan keahlian (*expertise*), kekuasaan dengan informasi (*informational*), kekuasaan ketika komunikan menjadikan komunikator rujukan (*referent power*), dan kekuasaan karena wewenang (*legitimate power*).
- Pesan : Apa yang dikomunikasikan untuk mencapai pemahaman makna komunikator kepada komunikan. Pesan yang tertata rapi ini perlu melalui tahap pengorganisasian, apakah pesan akan mendapatkan urutan deduktif, induktif, kronologis, spasial atau topikal. Pemikiran yang terbagi 6 ini muncul pertama kali oleh Aristoteles (Pujiana, 2019):
 1. Deduktif : Penyampaian pesan dari umum ke khusus.
 2. Induktif : Penyampaian pesan dari khusus ke umum
 3. Kronologis : Urutan pesan tertata berdasarkan waktu kejadian yang dijelaskan
 4. Logis : Pesan berisi penjelasan sebab akibat
 5. Spasial : Pesan tertata berdasarkan tempat

6. Topikal : Pesan tertata berdasarkan pentingnya topik, klasifikasinya, dari yang penting kepada yang kurang penting

- Saluran : Alat atau wahana yang digunakan agar pesan tersampaikan; apakah berbentuk verbal atau non-verbal atau apakah komunikasi dilakukan secara tatap muka atau melalui media seperti TV, radio, tulisan di internet, spanduk, *banner*, dan sebagainya.
- Penerima : Komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Komunikan dapat berupa personal, kelompok terbatas, masyarakat luas, lawan tujuan, pertemanan dalam satu tujuan, anggota baru, orang luar organisasi, anggota lama, orang yang membutuhkan laporan atau orang yang memerlukan laporan.
- Efek : Merujuk pada apa yang terjadi kepada komunikan setelah menerima pesan misal perasaan terharu, senang atau bahkan terjadi perubahan sikap, keyakinan dan perilaku. Suryadi membagi indikator efek dalam beberapa bagian, yaitu pemahaman pesan oleh komunikan, terjalin pemahaman bersama, terjadinya perubahan persepsi, bertambahnya persepsi baru yang sesuai, bertambahnya persepsi baru yang bertentangan, saling memperkaya pemahaman.

Tambahannya, dalam penyampaian pesan komunikator terhadap komunikan, haruslah gangguan/rintangan komunikasi dihilangkan. Gangguan/rintangan komunikasi ini didefinisikan Shannon dan Weaver sebagai sebuah intervensi yang terjadi terhadap salah satu komponen komunikasi sehingga berdampak pada tidak efektifnya pesan yang disampaikan (Shannon & Weaver,

1949 dalam Cangara, 2017:40). Gangguan/rintangan yang dapat muncul dan menggagalkan terlaksananya tujuan komunikasi pun dapat dijabarkan seperti:

- Gangguan Teknis : jika berupa channel noise pada saluran penampaian pesan, misal gangguan jaringan telepon
- Gangguan Semantik : jika pesan disampaikan dengan bahasa yang sulit dipahami komunikan atau menggunakan jargon yang tidak biasa.
- Gangguan Psikologis : jika ada persoalan dalam diri penerima pesan terhadap komunikator, misal perasaan curiga
- Rintangan fisik dan organik : Jika ada jarak atau kondisi fisik komunikan (misal bisu, tuli) yang mempersulit penyampaian pesan
- Rintangan status : Jika ada jarak sosial di antara peserta komunikasi yang menuntut pesertanya mempertimbangkan etika komunikasi, misal antara junior dan senior di perusahaan
- Rintangan Kerangka Berpikir : Jika ada perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap isu yang diangkat dalam pesan
- Rintangan Budaya : Jika ada perbedaan norma, nilai, kebiasaan yang dianut pihak-pihak yang berkomunikasi
- Rintangan Birokrasi : Jika ada struktur organisasi yang terlalu panjang sehingga pesan tidak tersampaikan

2. ORGANISASI

Organisasi berasal dari kata bahasa Yunani organon yang berarti alat bantu atau instrumen yang sengaja dibangun sekelompok orang untuk mencapai tujuannya (Effendhie, 2020). Lebih lanjut, David Cherrington mendefinisikan sebuah organisasi sebagai “sistem sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur dan yang didirikan oleh manusia serta beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka mencapai satu set tujuan tertentu,” (Sobirin, 2020). Untuk memperjelas eksistensi sebuah organisasi, terdapat beberapa karakteristik umum organisasi menurut Sobirin (2020), yaitu:

- Entitas Sosial = Sebagai entitas sosial, organisasi umumnya didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, bisa berumur puluhan tahun bahkan bisa mencapai waktu yang tidak terbatas.
- Beranggotakan minimal 2 orang = Didirikan oleh sekelompok orang yang hendak mencapai kesepakatan atau tujuan tertentu. Keberadaan lebih dari satu orang ini menjadi penting untuk terjadinya tukar pikiran dan kerjasama
- Berpola kerja terstruktur = Melakukan kegiatan dengan terjadwal, tidak hanya berkumpul tanpa mengorganisasikan agendanya
- Mempunyai tujuan = Organisasi didirikan karena manusia sebagai makhluk sosial sukar untuk mencapai tujuan individualnya jika segala sesuatunya harus dikerjakan sendiri
- Mempunyai identitas diri = Secara formal mengacu pada akta pendirian organisasi, apa yang menjadi fokus kegiatan organisasi,

bagaimana melakukannya dan apa tujuan pendirian organisasi tersebut.

Adapun organisasi juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok organisasi, mengemban tugas dan tanggungjawab, memproduksi barang atau orang dan mempengaruhi atau dipengaruhi orang (Ritonga, 2019). Keempat hal tersebut tentu tidak akan terpenuhi tanpa adanya agenda yang terstruktur dalam organisasi tersebut sehingga kegiatan komunikasi yang baik harus terlaksana.

Komunikasi baik ini juga akan berpengaruh pada bagaimana tujuan organisasi dapat terwujud sehingga istilah komunikasi organisasi dapat muncul ke permukaan. Zelko dan Dance mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal; komunikasi internal adalah komunikasi antara anggota organisasi dan komunikasi eksternal adalah komunikasi dengan lingkungan luar organisasi (Ritonga, 2019).

Goldhaber dalam Awaru (2019) mengemukakan bahwa komunikasi organisasi pun dapat terjadi dalam sebuah organisasi dan dapat didefinisikan ciri-cirinya sebagai:

1. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks
2. Komunikasi organisasi melibatkan pesan dan saluran, tujuan dan arah
3. Komunikasi organisasi melibatkan orang-orang dan sikap mereka.
4. Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain

Awaru (2019) menjelaskan jika komunikasi organisasi pun dapat terjadi dalam 2 tindakan umum, yaitu: penciptaan pesan dan penafsiran pesan. Dua kegiatan ini akan terus berlangsung di dalam maupun di luar organisasi. Kemudian, proses komunikasi akan berjalan dengan lancar ketika komunikator dapat menyampaikan pesan dengan media atau cara yang tepat sehingga komunikan dapat memahami pesan dan memberikan respon yang sesuai (Hermawan, 2020).

3. KEBEBASAN BERAGAMA

Kebebasan beragama sering terdengar dan rasanya amat fundamental. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, perlulah memecahnya dalam konsep, sehingga muncul kata 'kebebasan' yang sering bias makna. Menurut Bertens dalam Etika mengatakan bahwa kebebasan bisa muncul sebagai rasa namun tak selalu dapat diartikan secara objektif (1997 dalam Sartini, 2019:242). Kebebasan ini akan lebih berarti jelas ketika ia bersanding dengan "dari dan untuk", yaitu mengerucutkan kebebasan pada kebebasan dari, misal, paksaan/kekerasan atau kebebasan untuk mengekspresikan agamanya. Berikutnya 'agama' yang merupakan suatu sistem kepercayaan pada entitas supernatural sudah muncul sejak jaman manusia paling primitif sekalipun kemudian menjadi hal yang hidup berdampingan dengan manusia (Pals, 2001 dalam Sartini, 2019 : 247). Berdasarkan kedua konsep singkat tersebut dapat terlihat bahwa kebebasan beragama merupakan suatu sistem kepercayaan yang mendorong munculnya kebebasan dari intoleransi dan nilai negatif lainnya sembari menjamin kebebasan untuk menjalankannya.

Kebebasan beragama ini juga bagian dari Hak Asasi Manusia yang kodrati. Hendardi selaku Pendiri Setara Institut menganggap bahwa kebebasan beragama merupakan hak bagi manusia dan lebih dari itu justru melekat pada dirinya (Sartini,

2019 : 247). Hal ini pun tertanam dalam nilai paling dasar yang Indonesia anut, yaitu Pancasila sila 1, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa; kemudian turun dalam undang-undang pasal 28 E ayat 1 dan pasal 29 yang mengatur tentang kebebasan beragama. Indonesia juga memiliki dasar hukum tertulis lainnya untuk menjamin kebebasan beragama warga negaranya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Tak hanya itu, hak kebebasan beragama pun teratur secara universal dan diakui dunia. Salah satunya berdasarkan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18 yang pemerintah Indonesia ratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 berbunyi bahwa:

- Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama dan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah
- Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama
- Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Universalitas kebebasan agama sejatinya berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali. Perbedaan ras, warna kulit, bahkan orientasi seksual tidak seharusnya menjadi penghalang kebebasan itu. Bagaimana individu menjalankan ajaran agamanya adalah urusan pribadi antara dia dengan Tuhannya sehingga

penghakiman massa atas sekelompok orang tidak seharusnya terjadi; mayoritas dan minoritas harus sejajar posisinya (Handayani Febri, 2019).

F. METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (dalam Rahmat, 2009 : 2) penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia terhadap suatu fenomena. Hal ini pun dilanjutkan oleh Strauss (dalam Rahmat 2009 : 3) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tak dapat tercapai dengan pengukuran atau statistik dan secara umum digunakan untuk menerawang fenomena seperti kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalitas organisasi, dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian “Strategi Komunikasi Yayasan Kebaya dalam Upaya Mengurangi Diskriminasi Kebebasan Beragama” akan bertumpu pada hasil wawancara dengan pihak Yayasan Kebaya untuk memahami dan dapat menyimpulkan data deskriptif dari cara dan metode yang Yayasan Kebaya lakukan dalam kegiatan mengedukasi masyarakat awam tersebut. Hal ini pun selaras dengan salah satu ciri penelitian kualitatif dimana peneliti harus menjadi tangan pertama yang turun ke lapangan dan menggali data menggunakan teknik wawancara dengan posisi subjek penelitian yang setara dengan peneliti (Rahmat, 2009: 4).

2. Metode Penelitian

Peneliti yang memilih jenis penelitian kualitatif ini menyandingkannya dengan metode penelitian deksriptif. Itu artinya, pemaparan dari narasumber akan menjadi dasar pengolahan analisis. Nawawi (2006) mendeskripsikan metode ini sebagai metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan sebuah objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Mengacu pada penjelasan di atas, peneliti akan menjabarkan strategi komunikasi yang Yayasan Kebaya pilih saat berinteraksi dengan masyarakat awam luar komunitas. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana Yayasan Kebaya mereduksi diskriminasi kebebasan beragamanya

3. Subjek Penelitian

Penelitian bertajuk “Strategi Komunikasi Yayasan Kebaya Dalam Upaya Mengurangi Diskriminasi Kebebasan Beragama” akan berfokus pada beberapa narasumber yang dianggap kredibel, yaitu pengurus atau personil yang sering menjadi pembicara yang berkomunikasi dengan masyarakat target secara langsung. Terdapat beberapa pembicara yang sering turun dan mengunjungi masyarakat sasaran, antara lain:

- Rully Mallay > Pengelola Program Yayasan Kebaya
- Jenny Mikha > Focal Point Yayasan Kebaya

Narasumber yang dipilih berasal dari keanggotaan Yayasan Kebaya, dari pemimpin sampai staf Yayasan Kebaya yang masih aktif. Pengelola Program Yayasan Kebaya, Rully, menjelaskan bahwa *volunteer* bisa menjadi punggawa pendekatan ke masyarakat namun untuk menjaga perspektif Yayasan Kebaya

sebagai penyelenggara, peneliti hanya mengambil pembicara internal yayasan satu ini.

4. Jenis data

Menurut Moleong (2000 dalam Rijali, 2018) sumber data dalam penelitian deskriptif kualitatif dibagi menjadi data utama yang berupa kata-kata dan tindakan dan data tambahan berupa dokumen atau sumber data tertulis, foto atau statistik. Data utama dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dimana proses wawancara direkam atau dicatat. Sedangkan data tambahan dikutip dari dokumen-dokumen atau sumber tertulis lainnya, seperti buku, laporan, arsip dan sebagainya.

Pada penelitian ini, data utama atau yang biasa dikenal sebagai data primer akan diambil berdasarkan hasil wawancara via telepon atau *video call* dengan narasumber yang sudah terpilih. Dokumentasi berupa foto akan didapatkan dari arsip narasumber karena tidak memungkinkan untuk bertatap muka di tengah *social distancing* Covid-19. Selain arsip berupa foto, data tambahan lain yang akan membantu proses penelitian ini berasal dari arsip Yayasan Kebaya, laporan atau buku-buku terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian deskriptif kualitatif akan membutuhkan penjabaran dari narasumber agar pembahasan menjadi konkrit. Untuk itu, proses wawancara menjadi cocok digunakan untuk tipe penelitian ini. Rahmat menjelaskan bahwa teknik wawancara adalah suatu cara untuk melakukan *fact-checking* dengan proses

tanya jawab dengan narasumber; tujuannya untuk menggali secara dalam (Rahmat, 2009: 7).

Teknik observasi tidak dapat dilakukan karena peneliti tidak bisa mengikuti langsung proses terjun lapangan yang dilakukan Yayasan Kebaya ke masyarakat sasaran karena masih tidak diperbolehkannya perkumpulan massa akibat Covid-19. Penggantinya, peneliti pun menggunakan dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah setiap laporan atau informasi terkait diskusi yang dilakukan. Dokumen menjadi penting karena dapat membantu peneliti memahami kejadian-kejadian di waktu silam (Rahmat, 2009:7)

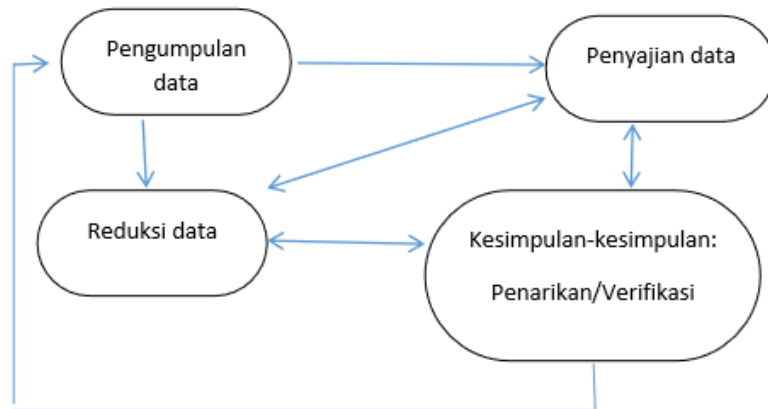
6. Metode Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998:104 dalam Rijali, 2018:81) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya” Tujuan pencarian dan penataan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang menjadi fokus penelitiannya sehingga dapat disajikan ulang kepada khayalak dengan lengkap. Metode analisis data pun beragam dan pada penelitian kali ini, peneliti mengambil metode analisis data dari Miles dan Huberman.

Miles dan Huberman (1992 dalam Rijali, 2018 : 83) menyatakan bahwa terdapat tiga teknik analisis data kualitatif, antara lain reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Jika digambarkan dalam bentuk bagan, maka akan terlihat seperti:

GRAFIK 1

Metode analisis Miles & Habermas



(Sumber: Rijali, 2018)

Pada awalnya, proses bermula dari tahap reduksi data di mana peneliti menajamkan informasi atau data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Setelah melalui proses reduksi data, tahap analisis masuk ke penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan di mana informasi yang telah terkumpul mulai disusun. Setelahnya, peneliti mulai masuk dalam tahap penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis dapat digunakan untuk mengambil tindakan, yaitu menentukan hasil analisis secara menyeluruh

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Strategi komunikasi yang Yayasan Kebaya dorong bermula dari diri komunikator di mana komunikator Yayasan Kebaya harus memiliki kemampuan dasar komunikasi baik yang disandingkan dengan pemahaman spesifik tentang hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945, undang-undang serta deklarasi hak asasi manusia. Pemahaman komunikasi dasar berguna untuk menciptakan rasa nyaman bagi lawan bicara agar tidak buru-buru menstigma komunikator Yayasan Kebaya yang transgender ini. Pemahaman spesifik tentang isu kebebasan beragama berguna untuk mendorong kredibilitas komunikator Yayasan Kebaya ketika turun ke masyarakat dan menyuarakan hak kebebasan beragamanya. Segala kemampuan komunikasi itu dilengkapi dengan atribut yang sopan dan tidak provokatif.

Kemampuan tersebut kemudian Yayasan Kebaya padukan dengan pilihan pendekatan tema inklusi. Jelasnya, pesan inklusi dan pemahaman kebebasan beragama tanpa diskriminasi ini harus tertuang dalam kehidupan sehari-hari komunikator Yayasan Kebaya. Hal ini merupakan upaya agar ada keselarasan antara nilai yang ditampilkan dan dijaga oleh komunikator Yayasan Kebaya di depan masyarakat. Laku hidup yang baik merupakan bagian yang juga terintegrasi dengan pesan yang Yayasan Kebaya bawakan selama hidupnya. Maka dari itu, juga merupakan kewajiban bagi komunikator Yayasan Kebaya untuk berpakaian sopan sehingga mereka dapat diterima masyarakat sasaran. Hal ini merupakan bentuk komunikasi non-verbal. Berbagai komponen sebelum turun ke masyarakat ini

merupakan bagian dari strategi komunikasi yang tidak bisa terlewatkan sebab juga memiliki andil dalam kesuksesan penyampaian pesan.

Berikutnya, setelah komunikator sudah memiliki persiapan matang dari segi pemahaman dan penampilan, masuk dalam strategi komunikasi berikutnya, yaitu pesan. Yayasan Kebaya awalnya menyampaikan pesan tanpa membawa definisi berat kemudian ketika masyarakat masih belum terpersuasi untuk merubah pandangan mereka terhadap kaum orientasi seksual minoritas, baru lah komunikator Yayasan Kebaya membawakan dasar hukum universal yang tertuang dalam UUD 1945, undang-undang serta deklarasi universal hak asasi manusia pada bagian di mana kebebasan beragama dijamin oleh negara.

Ketika terjadi diskriminasi dan dialog kekeluargaan gagal tercapai, Yayasan Kebaya akan melakukan penindakan formal. Artinya, ada perubahan tujuan di mana awalnya hanya komunikasi interpersonal kemudian menjadi komunikasi yang lebih serius di tataran mediasi. Hal ini sangat penting bagi Yayasan Kebaya yang melindungi kaum minoritas agar tercapai haknya. Berdasarkan alur pesan yang Yayasan Kebaya gunakan, maka pesan yang Yayasan Kebaya berikan beralur deduktif atau dari umum ke spesifik. Alur umum ke spesifik ini Yayasan Kebaya pilih sebagai bagian dari strategi komunikasi mereka pada masyarakat merupakan strategi yang baik karena tujuan Yayasan Kebaya turun ke masyarakat adalah pendekatan bukan sekedar 'seminar' yang membahas teori yang mungkin tidak masyarakat awam pahami.

Pesan yang Yayasan Kebaya sampaikan ini pun biasanya terangkum dalam bentuk kegiatan yang bermacam-macam dan memberdayakan masyarakat sasaran, tidak hanya soal kegiatan keagamaan. Sebab seperti yang narasumber katakan, pada

setiap kegiatan berbagi inilah pesan komunikator Yayasan Kebaya mengenai kebebasan beragama diselipkan. Artinya, dalam bentuk kegiatan apa pun yang dapat mendekatkan mereka dengan masyarakat, pesan kebebasan beragama tanpa diskriminasi universal dapat tersampaikan di mana saja. Strategi ini menjadi penting karena jika turun ke masyarakat dalam bentuk kegiatan formal di mana Yayasan Kebaya menjadi pembicara, maka pendekatan tidak akan terjadi dan masyarakat tidak akan merasa tertarik untuk memahami kaum minoritas ini secara dekat.

Sayangnya, selama kegiatan turun ke masyarakat, terdapat 3 rintangan komunikasi yang menghambat proses penyebaran pesan kebebasan beragama bagi kaum yang sering dianggap negatif ini. Merujuk Yayasan Kebaya 3 rintangan itu adalah perbedaan latar belakang pendidikan, minimnya relasi dengan kaum marginal ini dan faktor budaya. Untuk melewati rintangan ini, Yayasan kebaya hanya berpegang pada konsistensi. Mereka menganggap bahwa pengulangan akan membuahkan hasil. Itu artinya, strategi komunikasi yang Yayasan Kebaya sudah disiapkan dari kesiapan komunikator, alur pesan sampai bagaimana pesan dibangun dalam suasana inklusi yang mendekatkan akan menjadi *'template'* utama saat memperjuangkan kebebasan beragama tanpa diskriminasi ini. *Template* ini pun akan terus diulang sampai cita-cita terhindar dari diskriminasi kebebasan beragama tercapai.

Lalu untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan sudah baik, butuh perbaikan atau butuh peningkatan, Yayasan Kebaya rutin melakukan evaluasi di akhir setiap kegiatannya berupa rapat. Biasanya Yayasan Kebaya juga mengobservasi masyarakat yang datang ke yayasan atau mengundang Yayasan

Kebaya menjadi bagian dalam acara tertentu. Bagi mereka kedatangan masyarakat dan undangan untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat sama dengan penerimaan. Terakhir, berdasarkan strategi komunikasi yang Yayasan Kebaya gunakan, terlihatlah tujuan apa yang mereka harapkan saat pesan tersampaikan pada masyarakat. Segala kegiatan komunikasi Yayasan Kebaya dengan masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan penerimaan luas masyarakat serta kebebasan beragama, mendekatkan diri dengan masyarakat luas ini dan tentunya mengurangi pendiskriminasian kebebasan beragama.

2. SARAN

- Bagi Yayasan Kebaya

Upaya yang Yayasan Kebaya lakukan untuk turun ke masyarakat, mendekatkan diri sekaligus menyelipkan pemahaman bahwa diskriminasi kebebasan beragama adalah salah sudah baik. Namun, gerakan sebaiknya tersiarkan di media, entah *online* atau konvensional. Tujuannya agar setiap nilai inklusi yang disebarkan pada masyarakat sekitar dapat diketahui masyarakat luas lainnya sehingga tujuan Yayasan Kebaya pada pengeliminasian diskriminasi dapat tercapai dengan lebih maksimal

- Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar melakukan lebih banyak observasi pada kegiatan Yayasan Kebaya untuk dapat menganalisa pesan non-verbal yang Yayasan Kebaya pancarkan saat turun ke masyarakat sebagai topik penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Adjie, Moch. 2020. *Survey on Acceptance in Indonesia Gives Hopes to LGBT Community*. (diakses 5 Oktober 2020) dari: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/28/survey-on-acceptance-in-indonesia-gives-hopes-to-lgbt-community.html>
- Amalia, Syafira. 2019. *Sejarah Gerakan dan Perjuangan Hak-hak LGBT di Indonesia*. (diakses 10 Juni 2020) dari: <https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia>
- Ainurrofiq. 2007. *Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Partisipasi*. (diakses 8 Juli 2020) dari: http://ainurrofiq.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/tesis_ainurrofiq_dimensi_trust.pdf
- Arfanda, Firman & Sakaria. 2015. *Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Waria*. Jurnal Alternatif, Vol 1, Juli, hal: 93-101. Fisip Universitas Hassanudin
- Awaru, Tenri. 2019. *Komunikasi Organisasi*. Ilmu Komunikasi. Universitas Muslim Indonesia. Skripsi.
- Cangara, Hafied. 2017. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Grafindo
- Effendhie, Machmoed. 2020. *Pengantar Organisasi*. (diakses 4 Desember 2020) <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ASIP420902-M1.pdf>

Endsjo, Dag. 2020. *The other way around? How freedom of religion may protect LGBT rights.* (diakses 9 Desember 2020) dari:
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2020.1763961>

Eunson, Baden. 2015. *Non verbal Communication.* (diakses 25 Oktober 2020) dari:
https://www.researchgate.net/publication/275965639_Non-Verbal_Communication

Faturochman. 2009. *Psikologi Sosial.* (diakses 25 Oktober 2020) dari:
https://www.researchgate.net/profile/Faturochman_Faturochman/publication/336572987_PSIKOLOGI_SOSIAL/links/5da66543299bf1c1e4c37612/PSIKOLOGI-SOSIAL.pdf

Flammer, August. 1981. *Toward of A Theory of People Asking.* Fribourg University: Switzerland

Haryanto & Risza. 2018. *Kemitraan dalam Perspektif Praktis.* (diakses 25 Oktober 2020) dari:
https://www.researchgate.net/publication/330738662_Kemitraan_Dalam_Perspektif_Praktis

Handayani, Febri. 2016. *Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD 1945 Serta Kaitannya dengan HAM.*

Hazanah, Hasyim. 2016. *Teknik-Teknik Observasi.* Jurnal, Vol 8, Juli, hal:24-46.
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang

Hermawan, Dodi. 2020. *Komunikasi dalam Organisasi*. (diakses 15 Desember 2020) dari: <https://media.neliti.com/media/publications/77643-ID-komunikasi-dalam-organisasi.pdf>

Human Right Watch. 2016. *Permainan Politik ini Menghancurkan Hidup Kami: Kelompok LGBT Indonesia Dalam Ancaman*. (diakses 11 Juli 2020) dari: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0816bahasaindonesia_web_0.pdf

Human Rights Watch. 2018. *Scared in Public, Now No Privacy: Human Rights and Public Health Impacts of Indonesia's Anti-LGBT Moral Panic*. (diakses 10 Juli 2020) dari: https://www.hrw.org/sites/default/files/accessible_document/indonesia0618_lgbt_web.pdf

Human Right Watch. 2018. *Gerakan Anti-LGBT di Indonesia Semestinya Jadi Perhatian Seluruh Asia*. (diakses 10 Juli 2020) dari: <https://www.hrw.org/id/news/2018/02/21/315252>

Kapur. 2018. *Impact of Culture in Education*. (diakses Agustus 4 2020) dari: https://www.researchgate.net/publication/323794724_Impact_of_Culture_on_Education

Kuptsevych, Anatasia. 2014. *The Influence of Religiosity On The Attitudes Towards Homosexuality Among College Students*. (diakses 6 Desember 2020) dari: <https://cornerstone.lib.mnsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1302&context=etds>

- Komalasari. 2013. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Yayasan*. (diakses 8 September 2020) dari:
https://bphn.go.id/data/documents/ae_yayasan.pdf
- Koch, Thomas. 2017. *A Repetition Frequency Model Of Persuasive Communication*. Universitas Mainz.
- Lembaga Bantuan Hukum. 2016. *Penyegelan dan Penutupan Ponpes Waria Al-Fatah Merupakan Pelanggaran Hak Beragama dan Berkeyakinan*. (diakses 5 Desember 2020) dari:
<https://lbhyogyakarta.org/2016/03/10/penyegelan-dan-penutupan-ponpes-waria-al-fatah-merupakan-pelanggaran-hak-beragama-dan-berkeyakinan/>
- Lestari, Gina. 2015. *Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara*. (diakses 7 September 2020) dari:
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=397484&val=8691&title=BHINNEKHA%20TUNGGAL%20IKA%20KHASANAH%20MULTIKULTURAL%20INDONESIA%20DI%20TENGAH%20KEHIDUPAN%20SARA>
- Mahkamah Agung. 2016. *Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (diakses 6 Oktober 2020) dari:
https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_mediasi_pengadilan_web.pdf
- McGarry & Kendrick. 1974. *Communicator Credibility and Persuasion*. Kent State University.

- Molinero & Madruga. 2011. *Knowledge and Question Asking*. (diakses 15 Oktober 2020) dari: <http://www.psicothema.com/pdf/3845.pdf>
- Muthmainnah, Yulianti. 2016. *LGBT Human Rights in Indonesian Policies*. Jurnal Alternatif, Vol. 4, Maret, hal: 13-29. Indonesian Feminist Journal
- Novianto, Resky. 2019. *Catatan Kelam 12 Tahun Persekusi LGBT di Indonesia*. (diakses 24 Oktober 2020) dari: https://kbr.id/nasional/09-2019/catatan_kelam_12_tahun_persekusi_lgbt_di_indonesia/100636.html
- Oetomo-Oen, Deden, 1980. *Charting Gay Politic in Indonesia*. (diakses 17 Juni 2020) dari: <https://drive.google.com/file/d/0BylkvJXrKl9AbW5tZlk3LXV1ZW8/view>
- Pujiana, Tri. 2019. *Psikologi Komunikator dan Psikologi Pesan*. Sarjana Pertanian. Universitas Lampung. Skripsi.
- Rahmat, Saeful. 2009. *Penelitian Kualitatif*. (diakses dari: 8 Juni 2020) dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. (diakses 8 Juni 2020) dari : <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691>
- Renaldi, Adi. 2019. *Merekam Jatuh Bangun Satu-satunya Pesantren Khusus Transpuan di Indonesia*. (diakses 9 Agustus 2020) dari: <https://www.vice.com/id/article/59nm4x/merekam-jatuh-bangun-satu-satunya-pesantren-khusus-transpuan-di-indonesia-shinta-ratri>

- Roggemans, Lilith. 2017. *Religion and Negative Attitudes towards Homosexuals: An Analysis of Urban Young People and Their Attitudes towards Homosexuality*. (Diakses 19 Oktober 2020) dari https://www.researchgate.net/publication/280563519_Religion_and_Negative_Attitudes_towards_Homosexuals_An_Analysis_of_Urban_Young_People_and_Their_Attitudes_towards_Homosexuality
- Ritonga, Elfi. 2019. *Komunikasi Organisasi*. (diakses 10 Desember 2020) dari: <https://core.ac.uk/download/pdf/195809957.pdf>
- Santoso, Meilanny. 2016. *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*
- Sartini. 2008. *Etika Kebebasan Beragama*. (diakses 27 September 2020) dari: <https://media.neliti.com/media/publications/79782-ID-etika-kebebasan-beragama.pdf>
- Sobirin, Achmad. 2020. *Organisasi dan Perilaku Organisasi*. (diakses 4 Desember 2020) dari: <http://repository.ut.ac.id/4581/1/EKMA5101-M1.pdf>
- Syaiful, Nilam. 2015. *Merebut Kewarganegaraan Inklusif*. (diakses 26 Oktober 2020) dari: <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/f/808/merebut-kewarganegaraan-inklusif-nilam-hamiddani>
- Syalaby, Ahcmad. 2016. *Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Seluruh Indonesia?* (diakses 10 Juni 2020) dari: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/o1e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>

Teresia, Genia. 2019. *Kelompok Minoritas Seksual dalam Terpaan Pelanggaran*

HAM. (diakses 14 Juni 2020) dari: https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/07/Laporan-Mondok-Stigma-dan-Diskriminasi-LGBT-2018_Final.pdf

United States Agency For International Development. 2013. *Hidup Sebagai LGBT*

di Asia: Laporan Nasional Indonesia. (diakses 4 Juli 2020) dari: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being_LGBT_in_Asia_Indonesia_Country_Report_Bahasa_language.pdf

West, Richard & Lynn Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi*, Edisi 3.

Jakarta: Salemba Humanika

Williams, Tiara. 2017. *The Psychology of Interpersonal Trust*. (diakses 15

Oktober 2020) dari: <https://www.mckendree.edu/academics/scholars/issue22/tiara-williams.pdf>

Wulan. 2016. *Pentingnya Keterampilan Mendengar Dalam Komunikasi Efektif*.

(diakses 15 Oktober 2020) dari: <https://media.neliti.com/media/publications/54775-ID-pentingnya-ketrampilan-mendengar-dalam-m.pdf>

Lampiran

Interview Guide:

Untuk Pengelola program LSM Kebaya, Rully Mallay dan Focal Point, Jenny

Mikha

| | | |
|---------------------|------------------------------|---|
| Strategi Komunikasi | Sifat Strategi Komunikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Dalam setting komunikasi apakah biasanya komunikasi mengenai kebebasan beragama dibicarakan? • Pengetahuan dasar apa yang harus dimiliki komunikator saat menyampaikan ide tentang kebebasan beragama? |
| | Komponen Strategi Komunikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Dari mana sajakah kredibilitas pesan dibangun? • Apakah ada penggunaan atraksi untuk membuat komunikan ingin mendengar pesan yang disampaikan? • Kekuasaan (pengetahuan, jabatan, dll) macam apa yang komunikator miliki untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat? • Pesan apakah yang biasanya digunakan agar masyarakat dapat memahami kebebasan beragama bagi LGBT? |

| | | |
|------------|--------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Melalui platform apa saja komunikasi kepada masyarakat dilakukan? • Bagaimanakah cara Yayasan Kebaya menyampaikan pesan agar nilai kebebasan beragama universal dapat dipahami oleh masyarakat? |
| | Perencanaan Komunikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimanakah Yayasan Kebaya mengetahui jika pesan yang disampaikan ke masyarakat berhasil? • Selain berkomunikasi interpersonal, apakah solusi lain untuk menekan diskriminasi kebebasan beragama LGBT? (diskusi? DII) |
| | Rintangan Komunikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Selama mendukung masyarakat, rintangan komunikasi apakah yang dilewati? • Bagaimanakah cara melampaui rintangan tersebut? |
| Organisasi | Karakteristik Organisasi | <ul style="list-style-type: none"> • Apakah tujuan yang Yayasan kebaya ingin capai ketika segala usaha pengurangan diskriminasi kebebasan beragama sudah dilakukan? |

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| | Ciri-ciri Komunikasi dalam Organisasi | <ul style="list-style-type: none"> Selain pesan yang disampaikan, apa usaha-usaha internal Yayasan Kebaya untuk memperkuat usaha pengurangan diskriminasi kebebasan beragama? |
| Kebebasan Beragama | Kebebasan beragama | <ul style="list-style-type: none"> Bagaimana diskriminasi kebebasan beragama berdampak pada kehidupan kaum LGBT secara luas? Apakah setiap dasar hukum mengenai kebebasan beragama dapat dirasakan dampaknya oleh kaum LGBT? |

Transkrip Wawancara

Wawancara Rully Mallay

P: Ceritakan sedikit soal diskriminasi kebebasan beragama yang Yayasan Kebaya advokasi

I: Satpol PP kulon progo itu kemarin menggeruduk kawan-kawan warkop di tengah malam dengan salah satu alasan dijelaskan karena mereka itu berjilbab. Ya itu dianggap penistaan agama, maka kami langsung advokasi, kami bertanya penistaan agamanya dari mana ya? Karena kalau menurut kita, jilbab itu kan sebenarnya hanya budaya, bukan hanya budaya Islam. Bahkan banyak orang di Turki, Spanyol atau Timur Tengah, bahkan di keuskupan itu, orang-orang pakai jilbab hitam tebal-tebal itu. Jangan salah, itu orang Kristiani ortodok, bukan islam. Jadi salah kalau dikatakan jilbab hanya milik segelitir orang.

Ya kan teman-teman kumpul di sana dalam rangka kegiatan usaha supaya bisa survive. Nah sekarang mangkal jelas bertentangan dengan UU prnografi dan lain sebagainya itu, lalu teman-teman ini harus seperti apa? Salah satu pendekatan sosial dan psikologis yang pernah dilakukan Bersama pak bupati dokter Hasto, kita itu sudah memberikan penguatan dengan simulant usaha dgn dokter hasto dan dipertahankan sampai hari ini, itu pencapaian yang cukup bagus.

Hanya itu yang komunikasikan ke satpol PP, kalau bisa diberikan toleransi dan tidak hanya berdasarkan laporan beberapa orang kemudian melakukan tindakan semena-mena. Itu menurut saya tidak menunjukkan aspek perlindungan hUkum terhadap kelompok minoritas dan orang-orang yang tidak berdaya, hanya mengikuti keinginan orang tertentu dan tidak merepresentasikan masy semua. Saya kira masyarakat sekitar itu juga baik-baik kok dengan teman-teman.

P: Dampak diskriminasi kepada teman-teman?

I: Menciptakan ketakutan. Saya bilang kita ini warga negara NKRI yang sah secara hukum, walaupun negara tidak memfasilitasi atau mengakui perbedaan gender tapi perlu diketahui, ketika negara ini terbentuk tahun 1945, kerangka besarnya adalah negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang salah satu tujuan bangsa ini melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia, ya berdasarkan aspek keadilan itu.

Bagaimana mereka menegakkan aspek keadilan kalau ada stigma, ada diskriminasi. Ada stereotype, ada pencitraan buruk kepada teman-teman minoritas, kemudian subordinasi kita dianggap lebih rendah, lebih sepele yang akhirnya menciptakan marginalisasi dengan stigma dan diskriminasi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan muncul berbagai macam muncul kekerasan verbal dan fisik. Semua itu bertentangan dengan nilai dasar UUD 1945 juga UU no 39 tahun 1999 yang berbicara tentang HAM.

Kan itu oleh kelompok tertentu dianggap liberal. Saya bilang itu bagaimana mungkin wakil rakyat kita mengesahkan UU no 39 tahun 1999 itu jika konsep

tentang HAM itu liberal. Justru negara ini mesti waspada terhadap orang-orang yang terlalu ekstrim menginterpretasikan Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.

P: Berarti penerapan hukum soal HAM terhadap minoritas belum terasa?

I: Ya jelas. Negara ini sudah meratifikasi UU yang didalamnya jelas disebutkan kebebasan beragama dan ekspresi itu termasuk hak asasi manusia, itu yang tidak disadari. Berdasarkan perjalanan bangsa ini, misal soal biksu yang ikut digaris depan melawan penjajah, tapi diabaikan. Tahun 1946 sampai sampai 1950-an bahkan kelompok radikal membunuh para biksu ini tapi kemudian waktu membuktikan bahwa orang yang berkontribusi baik terhadap negeri ini, ya mesti ya menjamin keberlangsungan mereka. Bahkan mereka berlindung dibawah ketiak saya yang seorang transgender, seorang bisSu. Itu adalah tamparan kepada mereka

P: Cara menyampaikan pesan tentang kebebasan dari diskriminasi beragama?

I: Kita harus terapkan dalam laku hidup sehari-hari tentang orang-orang yang berbeda secara identitas gender itu bukan suatu keinginan mereka sendiri. Negara ini harus mengakomodir semua perbedaan itu sesuai konsep Bhineka Tunggal Ika. Salah satu kebinekaan itu ya salah satunya perbedaan gender dan orientasi seksual. Itu adalah kekayaan. Tidak perlu dipertentangkan karena kalau kita melihat sisi perbedaan manusia di nusantara ini, kita tahu lebih dari 370 juta jiwa di Indonesia itu berbeda. Ya dari adat istiadat, agama, budaya.

Ya kita tunjukkan dalam contoh toleransi di kehidupan yang berbangsa berbhineka. Saat ini di tengah pandemi covid, apa yang kami lakukan? Misal mendirikan dapur umum di 9 titik. Kita menunjukkan ke masyarakat luas, kepada lansia, kepada orang yang tidak mampu tanpa melihat mereka agamanya apa atau latar belakangnya apa. Itu adalah cara kami melakukan inklusi untuk mereduksi diskriminasi yang terjadi dan ya untuk mematahkan konsep berpikir yang anti keberagaman. Kita ini tidak bisa menjadikan semua manusia ini, sama karena itu adalah salah satu konsep arogansi kelompok tertentu yang ingin menguasai bangsa Indonesia ini.

P: Langkah untuk mengurangi diskriminasi?

I: Ya menyusun program-program yang inklusif, menerapkan dalam aspek kehidupan interpersonal dengan masyarakat dan komunitas, membangun aspek

komunikasi antar lembaga. Misalnya dapur umum, itu untuk orang banyak, memberi makan orang yang tidak mampu, lansia. Yang masak orang-orang waria, nah itu salah satu langkah konkrit. Di pandemi covid ini mana ada orang yang peduli? Orang cenderung urus perut sendiri saja. Intinya inklusi kepada semua orang

P: Dasar suatu pesan tentang jangan diskrimansi agama, supaya kredibel?

I: Ya sudah jelas dari dasar negara ini. UUD 1945 itu sangat menghindari stigma dan diskriminasi, kita punya declaration of human rights, punya UU no 39 tahun 1999, itu yang menjadi dasarnya dan itu yang harus disampaikan atau dikampanyekan kepada masyarakat awam supaya tidak melakukan stigma dan diskriminasi

P: Bagaimana supaya masyarakat paham jika mereka tidak bisa memahami teori soal UU?

Seperti yang saya sampaikan, ya berbaur berinteraksi di dapur umum, selain dengan tulisan, misalnya melalui media sosial, melakukan inklusi dengan masyarakat

P: Bagaimana dengan orang-orang yang radikal?

I: Ya diabaikan saja dan terus berprinsip bahwa negara ini bukan hanya berdasarkan pada satu agama atau kelompok. Negara ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan yang berasas bhineka tunggal ika karena sejak proklamasi, negara ini memang sudah beragam dan keberagaman itu harus tercermin dalam kehidupan.

P: Kualitas apa yang harus dimiliki pembicara?

I: Dia harus punya skill dan pemahaman yang baik tentang konsep NKRI. Itu harus mutlak dipahami selain harus belajar bermasyarakat berinteraksi dengan inklusi. Bisa salah satunya dengan peningkatan kapasitas pemahaman paralegal. Tapi yang paling penting adalah partisipasi aktif dan melakukan upaya terus menerus dan konsisten agar orang lain memahami bahwa kita yang berbeda ini tidak ada masalah dengan NKRI. Itu yang harus dipahami.

P: Apakah penampilan pembicara penting?

I: Penting. Seperti normatifnya masyarakat umum tapi yang paling penting adalah bagaimana dia menunjukkan atau mengimplementasikan nilai-nilai dalam sikap perilaku hidup dan cara pandang, cara berpikir dia dalam melakukan tindakan sosial masyarakat

P: Bagaimana kehidupan minoritas terdampak dari segala tindakan komunikasi yang dilakukan?

I: Sepanjang pengorganisasian pada basis komunitas, ya kita relative bisa eksis meskipun ada tekanan. Misal situasi politik di tahun 2016 dimana soal LGBT naik, dari situ kita sudah belajar untuk bisa bertahan, bisa membela diri. Akhirnya kita masih survive sampai hari ini.

P: Contoh kegiatan yang dilakukan?

I: Ya banyak sekali pengorganisasian. Meliputi penguatan dari aspek hukum dan HAM. Bagaimana penerimaan diri yang berdampak pada akses interaksi dengan masyarakat dan memahami kehidupan berbangsa. Itu bentuk partisipasi positif yang dapat mengubah cara pandang masyarakat

P: Platform berbicara dimana?

I: Ya paling penting itu bentuk komunikasi dalam kehidupan praktis. Kita membangun komunikasi baik dengan masyarakat ya dalam segala aspek kehidupan.

P: Bagaimana cara memotivasi masyarakat untuk mau mendengar tentang kebebasan beragama?

Ya kita harus tunjukkan dalam laku. Pembelajaran tentang hidup beragam harus ditunjukkan dalam laku hidup dimana kita harus memiliki nilai positif yang dibawakan jadi tidak melulu mengacu pada perbedaan orientasi seksual. Soal kehidupan berwarga negara Indonesia, itu dulu.

P: Harapan tentang kebebasan beragama di mata mba?

I: Menciptakan sebuah negara yang dimulai dari membangun masyarakat minoritas yang punya penerimaan terhadap dirinya, membangun aspek perspektif yang baik dalam semua bentuk keberagaman dan mengakomodir nilai dan budaya normatif

sehingga penerimaan orang dalam proses inklusi itu akan menjadi kian besar. Kita berharap supaya teman-teman bisa berdiri mandiri sehingga kita akan belajar untuk mengkomodir kelompok minoritas.

P: Pernah turun ke pemerintah untuk memberikan aspirasi?

I: Sering. Kita sudah 14 tahun. Audiensi, melakukan workshop, melakukan pertemuan-pertemuan, bakti sosial dan lain-lain. Salah satu yang kita lakukan ya mengurus orang-orang terlantar, fakir miskin dan anak-anak, ya itu salah satu amanat UU loh, yang pemerintah pun belum bisa melakukan itu. Tapi karena kepekaan dan kepedulian sosial kita, kita mampu melakukan itu.

P: Jadi Yayasan ini seperti membantu pemerintah menepati janjinya?

I: Bukan seperti. Tapi memang iya. Kita melakukan sungguh-sungguh untuk itu.

P: Apa sudah membuahkan hasil?

I: Tentu saja banyak penerimaan yang kemudian terbuka. Dengan kegiatan positif itu, membantu masyarakat mulai berpikir positif terhadap kelompok minoritas terutama kelompok waria.

P: Jadi tujuan akhirnya adalah mendapatkan penerimaan?

I: Pasti

P: Selama berkomunikasi apa sih rintangannya?

I: Ada. Belum tentu semua yang kita lakukan itu bisa diterima masyarakat tapi tidak berarti banyak tantangan itu lalu kita berhenti. Kita jatuh sekali, maka harus bangun dua kali. Harus terus berusaha. Misal 2016, penyerangan ke ponpes, itu pukulan secara moral. Tapi kita tunjukkan, kita sebagai minoritas punya hak untuk melakukan ibadah dan berkeyakinan. Itu dijamin UUD 1945, UU no 39 tahun 1999 dan declaration of human rights. Walaupun banyak kelompok yang intoleran, mereka bersikukuh itu budaya barat, lah susah kalau kita berbicara dengan yang kontroversial itu susah, bukan hal yang baru. Sudah terjadi sejak bangsa ini berdiri. Ya tapi tidak apa-apa itu kan dinamika berdemokrasi

P: Jadi rintangannya bisa juga karena perbedaan latar belakang?

I: Pengalaman, pengetahuan, kedekatan atau pengenalan saja, itu masih kurang sehingga orang dengan mudah menstigma kelompok minoritas.

P: Kalau dalam konteks bercakap-cakap, mba bicaranya seperti apa?

I: Tunjukkan laku saja itu utamanya. Kalau ada yang bertanya baru kita jawab bahwa pada dasarnya kita ini sama dimata Tuhan, sama di mata hukum, sama di mata negara dan bangsa ini. Kita tidak perlu melihat terlalu jauh soal perbedaan karena tidak akan ada titik temunya. Tapi kita melihat juga, bahwa menunjukkan dengan perilaku tanpa bicara, kita datang dan memperlihatkan bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu bahwa kami yang berbeda bisa menyampaikan aspirasi masyarakat yang berbeda sehingga orang lalu berbuah perspektif bahwa oh ternyata transgender tidak melulu membicarakan tentang seksualitas, atau hal-hal yang berbau mesum atau hal-hal yang negatif.

P: Cara mengetahui kalau komunikasinya tercapai?

I: nah kita kan sering sekali diundang, nah itu artinya sudah mulai ada pengakuan terhadap kita yang berbeda tapi ya saya dating juga mewakili masyarakat, bukan entitas yang berbeda. Jadi ketika kita diterima oleh orang banyak dan orang banyak ini merasa kita mewakili masyarakat.

Kita juga harus evaluasi secara berkala dalam program-program itu kita menilai apakah program kita susah baik untuk menyampaikan pesan kita lalu kita melakukan perbaikan terhadap program, bagaimana cara kita mengimplementasi nilai kita bangun kemudian interaksi yang kita bangun, dampak-dampaknya seperti apa. Nah itu kita lakukan terus menerus untuk memonitoring hasil dan meningkatkan kualitas.

P: Sudah berapa lama di Yayasan Kebaya?

I: Sejak Ism berdiri tahun 2006, sudah 14 tahun sekarang. Saya konsisten memperjuangkan entitas kita yang berbeda ini yang masih mengalami stigma dan diskriminasi, masih mengalami persekusi, masih mengalami kekerasan dari orang-orang yang berbeda secara gender. Dan Yayasan Kebaya tidak Cuma HIV AIDS, kita ada pemberdayaan, ada advokasi. Fokusnya ke HIV AIDS karena kita ditunjuk pemerintah melalui dinas

P: Yayasan Kebaya itu seperti apa?

I: Yayasan Kebaya adalah Yayasan yang concern pada perubahan masyarakat untuk membangun penerimaan pada entitas yang berbeda dan orang-orang yang termajinalisasi sehingga kita melakukan upaya mengurangi diskriminasi, penguatan pemberdayaan ekonomi, sosial, hukum dan HAM dan melakukan upaya sebagai masyarakat sosial dalam partisipasi positif untuk membangun bangsa ini.

Wawancara Jeni Mikha

P: Pernah kah selama hidup pernah mengalami diskriminasi kebebasan beragama?

I: ya pernah sekitar 2017 itu pernah ada penyerangan salah satu ponpes Alfatah ketika isu LGBT naik tahun 2017 itu.

P: Bagaimana sih diskriminasi ini berdampak pada kehidupan teman-teman secara luas?

I: Dampaknya ya jelas yaitu kegiatan yang kami biasa lakukan di ponpes itu tidak bisa dilakukan seperti biasanya karena tiap minggu itu kita mengadakan kegiatan pendalaman agamanya, untuk kawan-kawan islam. Biasanya untuk teman-teman islam beribadahnya di pondok pesantren itu. Kalau untuk kawan-kawan nasrani kita mengadakan di UKDW sih kita tidak ada masalah. Tidak ada pendiskriminasian sama sekali.

P: Bagaimana perasaan kawan-kawan jika ada diskriminasi serupa?

I: Ya jelas down. Mereka itu sangat terpukul. Kebetulan yang melakukan penyerangan itu adalah satu organisasi radikal yang ada di Yogyakarta, terhadap mereka yang isu orientasi seksual dan gender.

P: Apakah dasar hukum yang melindungi LGBT tentang kebebasan beragama sudah dirasakan?

I: Belum. Karena belum ada yang menjamin. Karena orang-orang intoleran terhadap isu tertentu akan menggoreng hal-hal itu untuk dijadikan bahan kepentingan kelompoknya atau untuk apapun lah.. Tapi satu muaranya, ada peran

dari satu penguasa ini, yaitu pemerintah yang tidak bisa mengakomodir kebebasan beragama untuk orang-orang minoritas secara seksualitas. Tapi kan orang-orang di luar seksualitas minoritas juga, seperti contoh kaya Ahmadiyyah, yang lainnya juga sama, diserang juga, didiskriminasi juga.

P: Berarti hukum di Indonesia belum bisa menjaga secara universal?

I: Belum. Karena seolah2 kelompok yang radikal ini tidak ditindak secara tegas oleh pemerintah karena kepentingan pemerintah dan kelompok itu adalah kesatuan yang sama sebenarnya.

P: Sebagai focal point, gimana sih cara menyampaikan pesan supaya nilai kebebasan beragama bisa dipahami orang-orang?

I: Kalau saya sih sejak 2009, di tempat tinggal saya, ya inklusi yang sangat berpengaruh untuk bisa berdampingan hidup dengan masyarakat sosial. Inklusi itu misal dalam kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat, kita aktif berperan di situ. Tapi kita juga harus tahu perilaku mana yang baik. Misal kan transpuan itu agresif secara ekspresinya, itu adalah hal yang harus dibatasi dalam kehidupan sosial untuk menjadikan inklusi yang lebih baik.

P: Kalau masalah argument, ketemu dengan orang yang belum paham soal kebebasan beragama secara minoritas, argumennya apa?

I: Kalau saya, pendekatan pertama yang saya lakukan adalah mediasi. Cari tahu apa permasalahan dia kenapa dia punya argument radikal terhadap transpuan soal kebebasan beragama. Kalau poin yang biasanya ada kan banci ga boleh datang ke masjid nah anda sebagai manusia itu tidak ada yang boleh melarang siapapun datang ke tempat ibadah. Mungkin melalui penyampaian yang sederhana dulu lalu kalau dia berargumen ngeyel, kan tiap focal point pernah dididik dengan materi dasar-dasar hukum paralegal tingkat dasar, kami dikasih bukunya tuh, nah saya tidak kasih teori, setidaknya dia bisa memahami dengan membaca

P: Jelaskan hokum pararegal

I: Nah kami para focal point didelegasi untuk mengikuti pelatihan pararegal dimana pararegal itu nanti punya peran dalam komunitas atau pendampingan advokasi.

Selain itu, teman-teman komunitas juga bisa berperan di lingkungan masyarakatnya. Jadi, peran pararegal ini sudah ada dasar-dasar hukum jadi jika ada suatu advokasi di lingkungan masyarakat yang mengacu pada pendiskriminasian komunitas, teman-teman itu sudah punya bekal untuk memediainya

P: Satu point pararegal yang biasa digunakan contohnya apa ya?

I: Banyak, ada KBB, ada seksualitas dan gender. Disini sudah dirangkum dalam buku. Ada HAM, hak warga negara, hak sipil politik, hak advokasi Pendidikan dan kesehatan, berbagai macam isu ada di situ, jadi bukan cuma isu seksualitas dan gender saja.

p: Selain dari pararegal ini, biasanya kalau berargument menggunakan data kredibel apa lagi?

I: Bantuan hukum yang kredibel yang dari paralegal itu, karena buku panduan itu sudah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, yang buat ini dari Tifa Foundation, dari LBH.

P: Ketika bertemu oknum tapi mereka belum paham dan tidak mau mendengar, argumentasi lain apa sih yang disiapkan misalnya, kalau yang ambil dari paralegal ternyata tidak berhasil

I: Kalau aparat tidak bisa menyelesaikan isu dengan baik terhadap isu yang kita bawa, setidaknya kita mengordinasikan diri dengan tim-tim advokasi. Salah satunya dari LBH itu. Jadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, dengan mengacu pada panduan hukum pararegal itu sendiri atau missal saat teman-teman ditindak atas dasar pasal karet, kita membuat tim dengan pararegal Bersama LBH itu. Sebenarnya paralegal itu sudah bisa menyelesaikan masalah dari tingkat mediasi, menuju arah mitigasi.

P: Masalah pembicara, kualitas apa sih yang harus dia punya?

I: Pengetahuan tentang advokasi, tidak hanya mengacu pada teori saja. Advokasi itu bisa membicarakan masalah apapun, tidak hanya soal hukum saja.

P: Berarti atraksi, apa yang mengundang seseorang untuk mendengar juga diperlukan?

I: Harus memiliki pemahaman. Misal paralegal kan harus tahu hal yang mendasar

P: Bagaimana setiap komunikasi yang dilakukan berdampak pada kehidupan LGBT secara luas?

I: Ya berdampak, misal mereka yang dapat pelatihan di kulon progo, dimana ada penindakan dari penguasa dengan pasal karet, akhirnya kita bisa mediasi dan kita bisa ada impactnya teman komunitas serta ke penguasa itu. Akhirnya ia dibebaskan. Waktu ditahan mereka, mereka diberikan surat penindakan tetapi dalam surat penindakan itu berdasarkan pasal karet.

P: Bentuk diskusi ada apa saja selain face to face?

I: Pada bulan covid ini, kita webinar jaringan, ada juga webinar tentang keberagaman seksualitas. Sering bekerja sama dengan jaringan itu ya sebagai media kampanye, dari UIN, dari Atmajaya itu sendiri, dari UKDW, dan banyak lagi

P: Platformnya dimana saja?

I: Zoom karena kita mengikuti protokol kesehatan. Sebelum pandemik kita pergi ke komunitas. Untuk pendalaman agama kita di satu titik di kotagede. Kalau untuk masing-masing komunitas, kami tidak menyelenggarakan untuk kegiatan diskusi tentang keberagaman dalam beragama. Kecuali saat ada undangan ke kampus, misal ke UKDW, ya kami hadir.

P: Bagaimana cara untuk memotivasi agar masyarakat mau mendengar tentang kebebasan beragama itu?

I: Ya dengan inklusi, harus pendekatan ke masyarakat, ikut kegiatan. Dalam kegiatan tersebut kita, menyisipkan obrolan hak berkeyakinan itu bukan dilihat dari seksualitas atau ekspresi gender tapi manusia punya keinginan dan hak untuk beribadah, tidak melihat kami banci, kamu gay, kamu preman, kamu pendosa atau apa. Karena ibadah itu hanya mendekatkan kepada yang ilahi, bukan untuk dilihat orang bahwa kita mahluk yang alim secara sosial.

P: Biasanya bagi yang radikal, yang berbeda dianggap salah, untuk membuat mereka merasa universal?

I: Kita menyesuaikan dalam perilaku. Kalau dalam beribadah, yang penting misal berpakaian bersih di tempat ibadah itu menyesuaikan, kalau misalkan beranggapan bahwa karena pakai baju atau mukena, ya sudah ibadah di rumah saja. Toh ibadah itu tidak terfokus di satu tempat saja. Di rumah pun atau dimana pun kalau kita niat beribadah dan untuk menghindari hal-hal semacam konflik, ya sudah lakukan. Karena mungkin jika dipaksakan akan timbul konflik yang tidak terselesaikan atau mungkin berkelanjutan.

P: Harapan dari usaha komunikasi?

I: Saya pengen ketika penguasa itu bisa mengayomi warganya, bisa memberikan rasa nyaman pada warganya terlepas dari isu seksualitas dan gender. Jadi kalau kita hanya membawa isu seksualitas dan gender ya akan selalu kontroversial secara sosial. Yang perlu dikampanyekan hari ini adalah soal inklusi dengan perilaku sosial. Nah dengan perilaku sosial ini setidaknya membuka ruang gerak dimana teman-teman bisa berekspresi dan teman2 yang berperilaku berlebihan secara agresif, atau berpakaian, supaya dia paham etika, moralitas. Ya masa pengajian pakai rok mini kan tidak mungkin kan? Itu dalam masyarakat kan kurang etis.

P: Yang diharapkan adalah dari negara dulu supaya bisa turun ke masyarakat?

I: Betul

P: Sudahkah turun ke pemerintah untuk memberikan aspirasi?

I: Turun ke pemerintah itu waktu diskriminasi di ponpes alfatah 2017. Kemarin kita juga melakukan koordinasi dari titik-titik komunitas karena bukan tidak mungkin orang-orang yang punya pikiran radikal secara ideologis atau sosial terhadap isu tertentu, ya kita harus menguatkan dengan berbagai strategi. Salah satu caranya yaitu ke penguasanya yang paling bawah, yaitu tingkat wilayah pasti ada polsek, Polres. Misal polsek tidak punya suatu langkah untuk menetralsir diskriminasi, berarti penguasa tidak bisa mengayomi masyarakatnya dan hanya mementingkan kelompok tertentu, hanya mengotakkan dalam penyelesaian masalah.

P: Tujuan akhirnya? Apa yang ingin dicapai?

I: Segala advokasi agama, budaya, HAM, ekonomi dan lain-lain itu agar masyarakat bisa berinklusi dengan siapa pun, masyarakat bisa memahami keberagaman, bisa besinergi memajukan Indonesia tanpa harus mengotak-kotakkan isu tertentu.

P: Rintangan komunikasi?

I: Banyak. Misal ketika saya memberikan pemahaman tentang SOGIE, di lingkungan terdekat pun, yang sudah 12 tahun berjalan itu, mereka ya hanya tahu itu-itu saja; tahunya laki-laki dan perempuan. Padahal saya menjelaskan itu berkali-kali. Kalau memahami seseorang itu jangan dari secara ya... susah. Tapi itu berjalan dengan waktu. Karena penyerapan mungkin mempengaruhi mereka menerima pemahaman sogie itu satu factor tentang budaya, Pendidikan dan korelasi.

Misal budaya, mereka itu membiasakan hal kecil yang salah “ah itu kan anak kecil, ah dia kan memang begitu” itu kan yang susah. Dimana budaya dilanjutkan dimana kesalahan itu juga ikut dilanjutkan sehingga menumpuk, tidak ada penyelesaiannya.

Kedua dalam sisi korelasi. Dia jarang bergaul dengan orang sehingga ilmunya atau tingkat.. apa ya.. jadi tidak berkembang, stagnan. Jadi ketika saya sering bergaul, ketika saya pakai pakaian mini, saya merasa malu. Nah yang berikutnya Pendidikan karena kalau Pendidikan itu berpengaruh pada pola pikir masyarakat terhadap berbagai isu, bukan cuma soal gender saja, misalnya. Cuma 3 saja yang menghambat dalam memahami isu

P: Contoh mendekati masy awam?

I: Kalau saya mungkin berbicara tentang tubuh. Jika tubuh kamu perempuan atau laki2, apa yang kamu rasakan? Lalu dia, oh kan saya perempuan harus berpayudara, emang laki ga punya payudara? Coba laki-laki, ada kan payudaranya? Ukuran itu tidak mutlak, perempuan saja ada yang dadanya datar.

Atau misal ada orang “kok dia laki-laki, berbicaranya kemayu tapi dia berpakaian laki-laki?” Saya tidak bisa melihat dia sebagai seseorang yang melakukan hubungan seksual homoseksualitas, yak arena itu belum tentu, loh.

Kalau kamu hanya melihat secara ekspresi, kamu akan selalu berpandangan buruk terhadap isu atau orang lain, kecuali ketika kamu melihat seseorang dan ekspresinya sesuai dengan orientasi seksualnya, kamu berhak ngomong. Tapi kalau kamu tidak mengetahui hanya menebak, maka kamu melanggengkan budaya menjudge orang lain itu secara negative. Nah itu mungkin yang saya berikan kepada teman terdekat dulu sebelum ke orang lain untuk membantu memahami. Dari orang terdekat kan suka ngerumpi.

P: Mulai dari percakapan ringan dan tidak membawa teori?

I: Kalau teori itu orang belum tentu memahami dengan benar tapi praktek dan kita membicarakan serta implementasinya, dengan kehidupan kita sehari-hari, orang akan bisa terpengaruh. Sama dengan advokasi. Advokasi bukan hanya soal bersinggungan dengan hukum atau para legal tapi bagaimana ilmu itu melobi terhadap ke pokok permasalahan

P: jadi misal ngomong tentang kebebasan beragama itu mengacu pada nilai HAM Universal kah?

I: Jelas. Tapi pemahaman masy tentang HAM sangat minim walaupun mungkin pernah belajar tingkat sd, smp, sma. Pada era sekarang ini masyarakat kurang paham isu HAM. Mereka cenderung ikut-ikutan dalam mencerna suatu materi yang berguna juga untuk mereka juga. Bukan hanya kita sekedar di komunitas

P: Kalau dasarnya susah apalagi membawa ke topik yang lebih berat

I: Jelas

P: Caranya seperti apa?

I: Kalau saya memfokuskan kita belajar itu ya tidak harus.. misal belajar tentang sogie, sogie itu berhubungan dengan HAM loh. Jadi menyambungkan pokok permasalahan ke permasalahan lain yang pada akhirnya nanti mereka paham apa itu sogie, apa itu HAM.

P: Langkah-langkah turun ke masyarakat?

I: Ikut berperan di lingkungan dengan mendekati diri dengan masy, sekaligus kampanye apa itu inklusi ham. Teman2 harus bisa memahami lingkungan, misal nih ada2 kerajinan, nah dalam kerajinan itu dan disana diselipkan dengan isu isu yang kita bawa. Dan mereka yang tidak paham menjadi sedikit paham

P: Diselipkan saat bercakap-cakap?

I: Jelas, misal kegiatan di masy ya tanya jawab, apa yg pernah dialami di lingkungan terhadap dengan org yang berbeda itu. Nah dari situ kita tanya balik lagi pertanyaan, hingga bersambung sampai sogie dan HAM. Kalau saya kunci mengedukasi seperti itu. Jadi kalau kita menerangkan secara materi, orang males dan orang kurang tentang isu, gitu. Tapi kalau kita bisa mengambil peran dengan cara komunikatif, mereka akan senang. Sedikitnya ada ilmu yang masuk sih, beda dengan ketika beri materi seperti presentasi, ya kesannya gimana gitu.

P: Argumen yang sering dipakai

I: Kalau di internal kita menguatkan kapasitas teman-teman di organisasi biar lebih paham lagi tentang isu keberagaman. Temen-temen itu harus bisa menjaga sikap dan perilakunya untuk bisa berinklusi dengan sosial, kita juga harus berjejaring dengan yang membahas soal kbb ini untuk bisa mengakomodir gerakan suatu kepentingan untuk isu yang lain. Misal kita hanya membawa isu yang satu, misalkan seksual dan gender tapi tidak dikaitkan dengan isu KBB, itu tidak akan terbaca situasinya. Tapi kalau kita masuk ke kbb saja, tidak ada gerakan yang membaca apa yang kita kampanyekan kepada lingkungan. Itu adalah cara paling mudah untuk bisa mengaitkan isu tentang kampanye SOGIE, atau masalah gender atau

Kalau eksternal itu kita berjejaring. Misal untuk transpuan harus berjejaring ke mereka yang membawa isu perempuan karena perempuan pun akan mengalami hal yang sama dalam gerakan. Nah kita harus bisa masuk di isu yang lain tadi. Bukan di isu komunitas saja. Itu cara kita bisa membaca situasi sosial di masyarakat, bisa mendapatkan ilmu baru soal gerakan di komunitas, bukan secara kapasitas saja lah

P: Pesan yang biasa dibawa?

I: Agar bisa orang itu paham keberagaman

P: Argumen apa yang biasa dipakai supaya masyarakat itu paham

I: Jargon utama ya inklusi, dengan berkegiatan di lingkungan masyarakat sambil menyelipkan materi-materi. Misal soal keberagaman bukan soal seksualitas saja tapi ada profesi dan sebagainya nah kita membawa itu sambil membahas sogie tersebut. Poinnya inklusi

P: Pentingkah pembawaan diri atau penampilan?

P: Pembawaan diri merupakan suatu perilaku dimana.. misal begini, saat saya bicara soal bahas tubuh, orang pasti memandag saya seksi, entah dari pakaiannya atau gaya bicaranya. Tapi kalau orang memahami cara berperilaku dan situasi masyarakat, ia akan paham cara berpakaian atau berkomunikasi yang baik. Itu pr bagi teman-teman di komunitas agar inklusi itu bisa berjalan dengan baik. Jika teman2 tidak bisa memahami situasi/kondisi masyarakat dengan missal berpakaian.. atau cara berperilakunya di atas batas kewajaran masyarakat ya akan sia-sia juga.

P: Langkah yang sudah ditempuh untuk mengurangi diskriminasi kebebasan beragama?

I: Pertama, berjejaring dengan isu yang sama, yaitu dengan skrikandi lintas iman. Jadi mereka itu concern pada isu kebebasan beragama. Di komunitas itu kita diajarkan bagaimana caranya membaca gerakan orang-orang radikal agar kita punya yang namanya security system untuk komunitas. Lalu kita sudah ada persiapan yang mesti kita lakukan untuk menjaga kebebasan beragama itu sendiri dari hal yang kita tidak ingini seperti waktu 2017 ponpes diserang itu

P: Jadi langkah yang dilakukan lebih kepada mempersiapkan diri jika diserang orang seperti itu?

I: Iya. Langkahnya dengan berjejaring dengan organisasi lintas iman itu sendiri. Kedua memperbanyak kegiatan yang seginya positif untuk agar orang tahu bahwa yang kita lakukan ya positif, misal melakukan pengajian melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sesuai jalurnya.

P: Cara mengetahui komunikasi yang dilakukan sudah efektif?

Ketika orang datang ke komunitas itu berarti dia melihat gerakan teman-teman itu positif dalam hal berkegiatan. Misal dulu orang tidak mengenal waria punya kegiatan ngaji mingguan. Sekarang misalkan dengan adanya media, kita mengampanyekan kegiatan positif kami. Salah satunya pihak akademisi datang untuk meneliti, misal kegiatan di pondok itu benar-benar melakukan dengan positif, tidak seperti apa yang mereka bayangkan seperti pesantren yang hanya diisi waria.

P: Langkah untuk memahami urgensi bicara soal kebebasan beragama?

I: Dasarnya penguatan kapasitas kepada teman2 thd isu. Lalu berjejaring tentang materi-materi solusi untuk masalah diskriminasi kebebasan beragama. Jika sudah memahami materi, teman-teman bisa mengimplementasikan ke masy, misal mengedukasi soal perilaku, melakukan kampanye di lingkungan sekitar bahwa minoritas punya andil besar dalam kegiatan positif. Nanti misal teman-teman pemahamannya sudah dapat, lalu nanti kami melakukan media kampanye di media sosial ke yang setidaknya netral pada isu keberagaman. Inklusi, kegiatan positif, pengedukasian ke masyarakat dengan materi/isu bahwa pentingnya keberagaman dalam inklusi, bukan diskriminasi hanya karena ada perbedaan

Jika kita toleran pada isu beragama misalkan kalau org beribadah dengan *casings* waria terus orang menggereruduk pesantren, apa yang salah sih? Padahal waria sama-sama manusia punya hak untuk beribadah dengan tenang, sesuai dalam ajarannya itu sendiri. Tapi kalau orang memaksakan untuk melakukan sesuai kehendak dia dalam melakukan hal peribadatan, itu sudah menyalahi aturan dalam hukum agama itu sendiri. Berarti dia mentuhankan dirinya untuk agama bukan.. intinya dia seolah-olah mentuhankan agama.

Cara untuk menyampaikan pesan dengan orang itu ya dengan teman-teman komunitas dalam berkegiatan agama melibatkan tokoh masy saja, kita mengundang elemen masy yang setidaknya bisa memahami keberagaman gender dan memahami hak manusia untuk beribadah

Hak setiap manusia dalam beribadah itu tanpa ada gangguan, kalau kelompok tertentu menyerang atas dasar pemahaman yang dia pahami dan kita sebagai komunitas berbeda dana harus ikut paham dia ya itu salah dong.

Kalau secara pararegal dan hukum, ada HAM tanpa ada pemaksaan dai kelompok atau orang yang tidak punya kesamaan dalam suatu.. kalau al quran kan tidak bisa diubah, nah yang intoleran itu harusnya memahami karena setiap orang tidak akan sama dalam hal beribadah tapi tujuannya sama.

P: Agenda kedepannya agar tidak terjadi penyerangan kepada kaum minoritas?

I: Agenda adalah kebutuhan, kalau ada kasus dulu itu kan berarti pembelajaran security system berbagai kegiatan atau yang menyangkut komunitas. Kuncinya, ada kasus atau tidak ada kasus, seharusnya teman-teman paham security system yang ada di komunitas salah satunya penguatan kapasitas terhadap isu keberagaman agama, konflik apa yang akan terjadi ketika kita melakukan ini,, itu sudah ada dalam pola pemetaan kasus, jadi ada atau tidak ada kasus kita sudah paham. Inklusi keberagaman agama itu sudah didapat dari dulu. Dengan cara teman datang ke tokoh yang punya peran baik kepada komunitas yang selama ini termarginalkan.

P: Menurut tokoh tentang inklusi?

I: Kalau kita mensupport sebagai manusia yang bebas dalam arti bebas untuk melakukan ibadah yang tenang kegiatan keagamaan tanpa rasa takut dari orang yang tidak sepaham. Misalkan kamu terpaku pada orang yang menyerang kamu, kamu akan disalahkan terus tapi bagaimana kamu terus berperan aktif dalam kegiatan keagamaan dengan mempublish tapi kamu juga harus bisa mengatur agar perilaku buruk tidak terekspos oleh media.

Nah tokoh agama itu juga berkata mereka itu ada untuk menjadi kekuatan bagi kita, kalau kita tidak diserang kita akan lemah terus dan kita tidak akan tahu keadaan kedepannya kayak gimana untuk teman-teman regenerasi selanjutnya.

P: Sudah berapa lama berkecimpung di dunia advokasi?

I: Advokasi saya dari tahun 2009 dimulai advokasi kesehatan sampai 2014 lalu advokasi teman-teman secara kapasitas jadi lebih banyak turun dijalan dan mengadvokasi teman-teman yang tertangkap satpol PP, mensamping kasus interen interal di komunitas terus mengadvokasi identitas di Kebaya. Nah, maka tahun 2019 saya dapat pelatihan pararegal tingkat dasar dari Kebaya. Kalau dulu saat teman-teman sakit saya bantu akses kesehatannya.

Dulu tahu LSM itu.. saya kan perantau ya dengan pertolongan, kita banyak melakukan diskusi yang mengarah ke suatu kelompok kecil yang bisa memfasilitasi teman-teman dengan isu sosial, salah satunya itu keberagaman seks dan gender, tentang kebebasan beragama karena tahu sendiri ekspresi saya seperti apa, banyak dari kasus itu kita bisa meningkat dalam segi pemikiran, timbul untai mau berkomunitas dulu baru ke organisasi, nah organisasi itu setelah tahu dari aktivitas kebutuhan yang ada di komunitas atau lebih tepatnya komunitas berbasis organisasi, itu induk dari ketiangan dari teman-teman di titik komunitas teman tinggal teman-teman.

Komunitas kalau mengakses advokasi harus punya legalitas secara hukum karena kebijakan tidak kita asal bicara dan mengikuti itu, tapi harus sesuai prosedur administrasi. Organisasi itu memfasilitasi teman-teman dalam birokrasi kalau di komunitas, kebutuhan yang benar-benar dipahami.

Komunitas itu tempat teman-teman tinggal, titik kumpul dalam hal misal dalam hal beribadah, misal ah banci, pakaiannya begini-begini, kita harus pahami dulu, bagaimana cara advokasi dalam hal pelarangan ibadah di lingkungan tempat tinggalnya, nanti teman komunitas berdiskusi dengan organisasi. Dari organisasi baru setelah tahu kronologi dan bisa diadvokasi, kita gandeng dari AJI atau LBH atau aktivis yang konsen pada isu keberagaman

P: Seperti apa Yayasan Kebaya itu?

I: Yayasan Kebaya itu Lembaga yang focus pada hiv aids kepada teman-teman yang dimarginalkan oleh lingkungan keluarga, yang ditelantarkan negara. Inisiatif membikin kelembagan untuk memfasilitasi teman yang sudah terpapar HIV Aids, dalam masa-masa pemulihannya membutuhkan tempat, nah Kebaya memberikan tempat aman berada di lingkup sosial